

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Intern dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kecamatan Cikakak

Ari Anggara¹, Tina Kartini², Evi Martaseli³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sukabumi

E-mail : arianggara1930611146@gmail.com¹, tinakartini386@ummi.ac.id²,
evimartaseli@yahoo.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Intern Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diolah adalah ringkasan Sistem Akuntansi dan Aktivitas Pengendalian dalam peningkatan Akuntabilitas Kantor Kecamatan Cikakak tahun 2021 yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan staf Kecamatan Cikakak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Kantor Kecamatan Cikakak dapat disimpulkan bahwa SAKD berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian mengenai Sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Kata kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengendalian Intern, Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan

Abstract

This study aims to determine the Implementation of the Regional Financial System and Internal Control Activities in an Effort to Increase Regional Financial Accountability at the Cikakak District Office, Sukabumi Regency. The type of research used in this research is case study research with a qualitative descriptive approach. The data processed is a summary of the Cikakak District Office budget for 2021 which was obtained from the results of interviews with Cikakak District staff. The analysis technique used in this study is descriptive analysis technique, namely by collecting and filtering the information obtained in a thorough and detailed manner, then describing it so that a clear picture is obtained. Based on the results of this study, it can be concluded that at the Cikakak District Office, it can be concluded that SAKD influences the accountability of regional financial management. The application of a regional financial accounting system and adequate control activities can increase financial accountability at the Cikakak District Office, Sukabumi Regency. The results of research on the government's internal control system strengthen the effect of presenting regional financial reports at the Cikakak District Office, Sukabumi Regency on regional financial management accountability.

Keyword: Regional Financial Accounting System, Internal Control, Improving Financial Accountability

PENDAHULUAN

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang bertanggung jawab dengan pengendalian yang sistematis dan terorganisir akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Salah satu upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat adalah dengan adanya pedoman laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan sistem akuntansi keuangan terfokus yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus ditetapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah laporan terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. SAP dengan demikian merupakan persyaratan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah menjadi perhatian para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi, dimana sistem ini sangat menentukan kemajuan daerah dengan latar belakang manajemen sumber daya manusia yang melek huruf dan terampil dalam mengelola dana daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik juga ditentukan oleh sistem pengendalian intern yang baik, artinya sikap evaluatif pemegang otoritas keuangan bertanggung jawab atas kesehatan keuangan instansi pemerintah yang ada, untuk memenuhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pegawai, produktivitas dalam tugas dan fungsi perangkat daerah serta pembiayaan pemeliharaan stabilitas yang digunakan untuk realisasi program kerja yang telah ada.

Pemerintah Daerah memiliki Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berupa proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan kegiatan transaksi (Pasal 1 Permendagri 13/2006). SAKD memberikan gambaran lengkap tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD (Pasal 5 PP 58/2008). SAKD yang dilaksanakan sesuai ketentuan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Artinya, pelaksanaan SAKD yang baik memerlukan suatu formula tertentu yang disepakati bersama, hal ini akan menghasilkan keberhasilan pelaksanaan APBD salah satunya di bidang pemberdayaan masyarakat atau pengadaan sarana masyarakat yang mendukung berbagai aspek yang dimiliki bersama

Menurut ((Zeny Antika, Yunika Murdayanti and Hafifah Nasution, 2020). Sistem informasi akuntansi daerah dapat dilakukan melalui informasi dan pengungkapan kinerja keuangan pemerintah. Tuntutan akuntabilitas keuangan daerah adalah penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang sehat.

Menurut Mulyadi (2022:163), sistem pengendalian intern merupakan penataan pengawasan keuangan daerah, yang meliputi metode dan langkah terkoordinasi untuk melindungi aset organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan catatan akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Menurut (Astuti and Yulianto, 2016) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menjawab serta menjelaskan kinerja dan perbuatan seseorang yang berstatus badan hukum sebagai pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk menuntut informasi atau pertanggungjawaban. Salah satu upaya untuk mewujudkan good governance menitikberatkan pada prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan tunai adalah unsur kegiatan yang pokok dan kegiatan rutin perusahaan. Sistem penjualan tunai meliputi jaringan prosedur dan fungsi-fungsi yang terkait dalam penjualan tunai.

Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi yang terletak di Jl. Sukawayana-Cilengsing, Cikakak, Sukabumi, Jawa Barat 43365, Indonesia. Cikakak merupakan salah satu Camat/Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang telah diteliti oleh peneliti

mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan akuntabilitas keuangan yang disebabkan oleh kurang efektifnya pengendalian intern dan kelalaian dalam sistem akuntansi pemerintahan. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa masih banyaknya ketidakakuratan dan miss accountability dari pelaporan keuangan pemerintah dan pemahaman SAP dari berbagai perangkat daerah yang beroperasi di industri keuangan menunjukkan pemahaman yang minim terhadap standar akuntansi pemerintahan karena kurangnya edukasi dan kesadaran akan pemahaman SAP yang diberikan. Artinya, penyebab utama ketidaktepatan dan kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas sumber daya manusia (Dewi, Mendra and Saitri, 2020). Oleh karena itu, Instansi Pemerintah Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi membutuhkan suatu formula baru untuk meningkatkan kompetensi di bidang keuangan agar memenuhi persyaratan khusus laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan riset lapangan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan yang terjadi di Kantor Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Melihat kondisi lapangan yang memiliki permasalahan mengenai akuntabilitas keuangan, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal yang minim, maka peneliti merumuskan penelitian dengan judul "Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Intern Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Mahmudi dalam penelitian (Zeny Antika, Yunika Murdayanti and Hafifah Nasution, 2020) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencarian, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Hasanah, (2018:195) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut: "Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi baik manual maupun otomatis, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja dan penerimaan daerah dan anggaran lainnya yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan seperangkat prosedur yang saling berkaitan diatur menurut skema umum yang diaudit menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi dan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, handal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Pengendalian Intern

Menurut (Nugroho Wijayanto, 2001:137) "siklus akuntansi yang melibatkan bagian-bagian seperti Valery G. Kumat, (2011:15) dalam bukunya mendefinisikan pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain.

Menurut Tuanakotta, (2013:13) dalam bukunya " Mendeteksi manipulasi laporan Akuntansi" mendefinisikan pengendalian internal merupakan perubahan mendasar dalam standar dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari audit berbasis resiko.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset pemerintahan atau perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan yang dapat merugikan perusahaan yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku, serta memberikan jaminan terhadap tercapainya efisiensi dan aktifitas perusahaan.

Akuntabilitas Keuangan

Menurut (Sedarmayanti, 2019) Akuntabilitas merupakan kewajiban penguasa/suatu individu yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan untuk menjawab mengenai hal yang bersangkutan dengan mempertanggungjawabkan secara riskal, manajerial dan program. Akuntabilitas dana kecamatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dari kepala/camat sehingga berpengaruh juga kepada ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana kecamatan (Karyanto, 2016).

Dapat disimpulkan Akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media. Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang terbuka dan akuntabilitas terhadap penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Kerangka Pemikiran

Menurut Halim (2019), dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah untuk memberi informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai. Agar akuntabilitas public terjamin, diperlukan sistem akuntansi yang baik transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah, sehingga dapat menggantikan sistem akuntansi yang selama ini diterapkan di pemerintah daerah khususnya di kantor kecamatan cikakak.

Dengan pengaruh sistem akuntansi, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang handal. Jika sistem akuntansi internal dan sistem pengendalian masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang dapat diandalkan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya sudah mulai memikirkan investasi untuk mengembangkan sistem akuntansi pemerintah daerah dan meningkatkan operasional yang lebih baik.

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisa atas seluruh aktivitas pemerintah daerah. Fungsi ini sangat penting karena menghasilkan pertimbangan dan saran yang bermanfaat untuk perencanaan berikutnya. Pengaruh penerapan aktivitas pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Atas hal tersebut, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang handal.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan integritas keuangan, pengungkapan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan pertanggungjawaban ini adalah penyajian laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dikembangkan dan ditetapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai. Menurut Mardiasmo (2020:227) memastikan akuntabilitas keuangan membutuhkan akuntansi yang transparan, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sistem yang karena sistem akuntansi merupakan penunjang terciptanya pengelolaan keuangan daerah dianggap cocok diterapkan di daerah, sehingga dapat menggantikan sistem akuntansi yang diterapkan di pemerintah daerah.

Akuntabilitas diwujudkan dalam suatu laporan keuangan dari pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan penjelasan atas laporan keuangan dan laporan barang. Untuk mendukung pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai harus dikembangkan dan disusun dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat.

nPengembangan sistem yang sebagai sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah dinilai cocok diterapkan di daerah sehingga dapat menggantikan sistem akuntansi yang diterapkan di pemerintah daerah.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam upaya mengetahui pengaruh sistem akuntansi daerah dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas dengan menggunakan metode pengumpulan data adalah studi lapangan sedangkan, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi

Kecamatan Cikakak merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Cisolak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2001, tanggal 23 Januari 2001 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Secara geografis keadaan Kantor Kecamatan Cikakak berada disebelah barat dari Kantor Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan radius 15 km dari arah ibu kota, 160 km dari ibu kota provinsi Jawa Barat, dilihat dari wilayah administrasinya Kecamatan Cikakak terdiri dari 9 Desa, 36 Dusun, 68 RW dan 256 RT dengan jumlah populasi 45.460 jiwa.

Penerapan Sistem Akuntansi Daerah Pada Kantor Kecamatan Cikakak

Dalam membuat perencanaan keuangan adalah dengan menentukan secara spesifik dan jelas mengenai tujuan yang diinginkan. Untuk membuat perencanaan keuangan adalah dengan rutin mencatat pendapatan dan pengeluaran bulanan yang ada di Kantor Kecamatan Cikakak. Hal ini diperlukan agar semua anggota Kecamatan mengetahui seberapa sehat kondisi keuangan yang ada di Kecamatan Cikakak. Selain itu, dengan rutin mencatat pendapatan dan pengeluaran bulanan, maka akan lebih mudah dalam membuat laporan keuangan dan financial planning ke depannya.

Perencanaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah Abdul Halim, (2018 :330). Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Perencanaan anggaran keuangan pada Kantor Kecamatan Cikakak melewati beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Perencanaan Setiap kepala seksi pada Kantor Kecamatan membuat daftar program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang berdasarkan tupoksi masing-masing dengan memperhatikan program yang diprioritaskan kabupaten dan sinkronisasi program Pusat dan Daerah selanjutnya di serahkan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk di susun menjadi rencana kerja (Renstra) untuk periode 5 tahun, Kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 tahun. Setelah Rencana Kerja (Renja) dan dibahas kembali untuk mengakomodir semua aspirasi yang ditetapkan pada Musrenbang Kabupaten yang dituangkan dalam KUA-PPAS kemudian terbentuklah Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA SKPD) oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Rencana kegiatan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kemudian di input di sistem yang kemudian di adakan pembahasan di DPRD, setelah diketuk palu/disetujui, terbentuklah Dokumen Pelaksana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD). Sistem pengelolaan administrasi keuangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Cikakak terbagi atas program antara lain:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- c. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- e. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- f. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kecamatan Keseluruhan program tersebut diatas yang menjadi pembiayaan kinerja Kantor Kecamatan Cikakak dalam melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Untuk perencanaan anggaran di Kantor Kecamatan dimulai dari pengumpulan program/kegiatan dari setiap seksi di kantor kecamatan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk di jadikan Rencana Strategis (Renstra) kemudian menjadi Rencana Kerja (Renja) atau RKA. RKA merupakan awal penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Setelah rencana ditetapkan di bentuk kemudian diadakan penetapan pagu SKPD yang disesuaikan dengan kemampuan Fiskal pemerintah daerah. Kemudian rencana kerja tadi menjadi rencana kegiatan anggaran. Lalu diadakan pembahasan komisi di DPRD terkait rasionalisasi penetapan rekening belanja RKA-SKPD dan rencana belanja SKPD, setelah disetujui maka ditetapkanlah DPA-SKPD. Kemudian diadakan rapat-rapat anggaran (Badan Anggaran) DPRD, kemudian evaluasi Rancangan APBD dan terakhir diadakan sidang paripurna DPRD untuk pengesahan APBD.

Pengendalian Intern Pada Kantor Kecamatan Cikakak

Berdasarkan hasil kesimpulan mengenai variabel Pengendalian Intern maka dapat dikatakan pengendalian intern pada Kecamatan Cikakak mengenai dimensi atau indikator tugas standar dan fungsi belum sesuai, hal ini diindikasikan kurangnya sumber daya manusia yang kurang atau kurangnya SDM yang ada pada Kecamatan Cikakak. Sementara itu mengenai dimensi dan indikator audit pengawasan dan standar peraturan UU yang ada pada Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hal ini sejalan dengan teori mengenai aktivitas Pengendalian Intern menurut Valery G. Kumat, (2018:15) dalam bukunya mendefinisikan pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, maka efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas keuangan. Semakin efektif sistem pengendalian intern akan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian ini mendukung riset yang dilakukan oleh (Nissa Surya Summuar, 2018)). Penerapan Sistem Pengendalian intern akan berdampak pada kegiatan operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Akuntabilitas Keuangan Kantor Kecamatan Cikakak

Berdasarkan hasil penelitian diatas pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi bahwa Akuntabilitas laporan keuangan Kecamatan Cikakak dapat dilihat dari dimensi atau indikator proses transportasi laporan, informasi melakukan anggaran, pelayanan terhadap masyarakat, keterbukaan terhadap kegiatan, dan mekanisme yang sudah berjalan dengan baik yang ada pada Kantor Kecamatan Cikakak. Pertanggung jawaban pemerintah kecamatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan adanya laporan pertanggung

jawaban yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh Kecamatan Cikakak. Pembuatan laporan pertanggungjawaban ini dibuat perjenjang atau pertriwulan untuk dilaporkan kepada pemerintah Daerah dan masyarakat. Proses penyampaian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk musyawarah yang diwakili oleh BPD selaku wakil dari masyarakat

Hal ini sejalan dengan teori akuntabilitas keuangan menurut Abdul Halim, (2018:254) merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan hasil akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Selanjutnya, (M Nazier, 2018) menyatakan laporan keuangan memiliki empat kepentingan, yaitu akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi. Sebagai akuntabilitas, artinya suatu instansi pemerintah seharusnya mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan secara periodik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kery Soetjipto, 2018), menunjukkan adanya pengaruh langsung penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang besar terhadap akuntabilitas publik, disebabkan pertanggungjawaban terutama pada produk sistem akuntansi. Penelitian Goddard, et al., (1994), Pieter et al., (1996) dan Jacobs, et al., (20018) mengatakan adanya peran akuntansi terhadap akuntabilitas. Adanya pengendalian merupakan suatu mekanisme yang dibangun untuk melakukan check and balances untuk menjamin kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam penyajian pelaporan keuangan harus mengacu pada standar profesional yang berlaku.

Dengan demikian maka pemerintah daerah dalam penyajian pelaporan keuangan kepada publik harus mengacu pada standar profesional yang berlaku yaitu standar akuntansi pemerintah. Steinhorsedotir, (2017:97) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan aspek yang sangat penting dari corporate governance. Manajemen menggunakan sistem pengendalian untuk menjamin tujuan organisasi tercapai. Pengendalian intern memainkan peran yang signifikan bagi organisasi terhadap terciptanya hal tersebut menjadikan perusahaan untuk memenuhi praktek pengelolaan perusahaan yang baik. Proses pengendalian intern harus dipandang secara realistik, yang memberikan jaminan yang reasonable yang melegitimasi bahwa tujuan akan tercapai. Maksud tersebut dapat pula diterapkan pada pemerintahan. (Berry Antoni J, 2017) meneliti akuntabilitas dan pengendalian di organisasi gereja yang merupakan organisasi sosial di Inggris.

Akuntabilitas ini terdiri dari perjanjian, konstitusi dan kontrak (covenant, constitution and contract). Dewan keuskupan dalam akuntabilitas kepada muktamar umum dengan cara: laporan hasil, membuat anggaran, memberikan akun yang telah diaudit, memberikan laporan reguler dari bisnis. (Berry Antoni J, 2017) menunjukkan adanya hubungan antara pengendalian dan akuntabilitas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Tingkat keeratan hubungan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan memiliki memberikan pengaruh yang signifikan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Kantor Kecamatan

Cikakak Kabupaten Sukabumi. Penerapan aktivitas pengendalian yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi

2. Sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan meningkatkan peran auditor intern yakni berfokus pada fungsi pengendalian intern sebagai bagian dari fungsi manajemen pemerintahan dengan melakukan pembinaan terhadap SKPD, evaluasi secara periodik melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi berpengaruh terhadap upaya meningkatkan akuntabilitas daerah pada pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Jika akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan maka upaya mewujudkan meningkatkan akuntabilitas daerah pada Kantor Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi akan tercapai

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi supaya lebih memaksimalkan dalam menyediakan kemudahan ruang akses karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terbatasnya ketersediaan ruang akses secara luas.
2. Diharapkan peneliti berikutnya bisa menambahkan variabel baru misalnya, menambah variabel kompetensi sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi, semakin berkualitas sumber daya manusia semakin mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Variabel lain yang mungkin bisa digunakan adalah variabel kinerja, kinerja penyelenggaraan dan mencerminkan pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, selain itu juga menggambarkan efisiensi, efektivitas, penghematan, dan produktivitas.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan memperluas wilayah penelitian sehingga mencakup lingkup penelitian yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2017) *No Title Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta.
- Aditya, O.R. and Surjono, W. (2017) 'Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan', *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), p. 49. Available at: <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>.
- Ardianto, R. and Eforis, C. (2019) 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), pp. 95–136. Available at: <https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44>.
- Astuti, T.P. and Yulianto, Y. (2016) 'Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014', *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>.
- Atikasari, D. and Jaeni, J. (2022) 'Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Kendal', *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), pp. 1212–1222. Available at: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2546>.
- Auliyah, I. and Papua, U.Y. (2023) 'FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI', 06(23), pp.

41–53.

- Budiarto, D.S. and Zulaika, I.N. (2022) 'Which One Is More Important: Internal Control System or Financial Report Accessibility?', *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(3), pp. 162–172. Available at: <https://doi.org/10.33508/jako.v14i3.3731>.
- COSO (2013) '2013 COSO Framework', *the committee of Sponsoring Organizatins of the Treadway Commission* [Preprint].
- Dewi, N.P.R.F., Mendra, N.P.Y. and Saitri, P.W. (2020) 'Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung', *Suparyanto dan Rosad* (2015, 5(3), pp. 248–253.
- Hasanah, N. (2018) *No Title Akuntansi Pemerintahan*. Cet. 1. Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
- Husna, maryam dan ikhbar (2022) 'Yang Lebih Besar Dari Nilai T', *pengaruh kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD kab aceh besar*, 4(2), pp. 206–214.
- Idawati, W. and Eleonora, L. (2020) 'Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan', *Equity*, 22(2), pp. 153–172. Available at: <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1367>.
- Kurniawan, D. and Rahayu, S. (2019) 'The Effect Of The Presentation Of Financial Statment And Accessibility Financial Statment On Regional Financial Management Accountability (Case Study in Mataram City Regional Secre)', *Management*, 6(1), pp. 705–714. Available at: <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/8743>.
- Nurhayati, N. (2017) 'Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia', *Jurnal Trias Politika*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062>.
- Oktaviani, M.A. and Sari, D.P. (2020) 'Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan', *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), pp. 186–193.
- Sipahutar, S.S.& R.P. (2019) 'Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis', *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7597(2), pp. 136–150.
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti and Hafifah Nasution (2020) 'Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah', *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), pp. 212–232. Available at: <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>.